

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Andreae, Fockema, 1983, *Kamus Istilah Hukum, Belanda-Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Jakarta.
- Apeldoorn, Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Omnibus law dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmadja, Arifin Soeria, dan Hartono, Darminto 2011, *Reformasi Hukum Indonesia Financial Law Perspective Terhadap Penyelesaian Utang-Piutang*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Atmadja, Arifin Soeria, 1986 *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Gramedia, Jakarta
- Boen, Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta.
- Boot, Machteld, 2001, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of The International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*, Intersentia, Antwerpen – Oxford – New York.
- Budiono, Herlien, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Buwono, Bagus SD Nur, dan Sulistiowati, 2021, *Running a Company Under Indonesian Laws*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

- Clark, Robert Charles, 1986, *Corporate Law*, Little, Brown and Company, Boston.
- Dicey, A.V., 1971, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London.
- Enschede, Ch. J., 2002, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer.
- Friedman, Lawrence M., 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Fuady, Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Aditya Citra Bhakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Farid, Zinal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 2006, *Indonesian Business Law*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. ten Berge, P.J.J. van Buuren, F.A.M. Stroink, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri., 2017, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hage, Jaap C., 1997, *Reasoning with Rules: an Essay on Legal Reasoning and Its Underlying Logic*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
- Hairi, Prianter Jaya, 2013, *Problematika Hukum Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara (dalam Kajian Seputar problematika keuangan negara, aset negara, dan kekayaan negara yang dipisahkan (penyunting: jur Udin Silalahi)*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta dan Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Hukum yang Berkeadilan dan Menyejahterakan: Sumbang Saran Pemikiran untuk Indonesia Baru*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- House of Commons, 2011, *Glossary of Parliamentary Procedure*, hlm. 38.

- H.S., H. Salim., dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta.
- Indonesia. Mahkamah Konstitusi; . 2008. *Naskah komprehensif perubahan undang-undang Dasar negara RI tahun 1945 : latar belakang, proses, dan hasil pembahasan 1999-2002 Buku VIII*. Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kartohadiprojo, Sudirman, 1979, *Hukum Perdata*, Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1991. *General Theory of Norms*, diterjemahkan oleh Michael Hartney, Clarendon Press, Oxford.
- Kelsen, Hans, 2008, *General Theory of Law and State*, New York: Russel and Russel, 1971, diterjemahkan oleh Raisul Muftaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Kelsen, Hans 2008, *Pure Theory of Law*, Berkely, University of California Press, 1978, diterjemahkan oleh Raisul Muttapien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2015, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan karya Tulis)*, Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Arief Sidharta., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Buku 1*, PT. Alumni, Bandung.
- Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta.
- Lraakman, Reinier R., Paul Davies, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus J. Hopt, Hideki Kanda, Edward B. Rock, 2006, *The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach*, Oxford University Press, New York.
- Makawimbang, Hernold Fery, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

- Makawimbang, Hernold Fery, 2015, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media dan PSA PKKN, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2017, *Teori Hukum* (edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Hiariej, Eddy O.S, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Indonesia, Red & White Publishing, Jakarta.
- Mulyana, Asep N., 2018, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nasarudin, Irsan, dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Noor, Hendry Julian, 2022, *Memahami Kerugian BUMN (Persero) Diskursus Kerugian Keuangan Negara dan Tipikor*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Nurbaningsih, Enny, 2022, *Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional*, Rajawali Pers, Depok.
- Ost, François, diterjemahkan oleh Iain Stewart. 2002. *Legal System between Order and Disorder*, Oxford, Clarendon Press Oxford.
- Otto, Jan Michiel, 2012, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Jan Michiel Otto, *et.al.* (ed), 2012, *Kajian Sociol-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar.
- Pontier, J.A., 2008, *Penemuan Hukum*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung.
- Prakken, Henry dan Sartor, Giovanni, 1997. *Logical Models of Legal Argumentation*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
- Pramono, Nindy, 2006 *Kekayaan Negara yang Dipisahkan menurut UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN*, dalam Sri Rejeki H, dkk. (ed), tanpa penerbit.

- Pramono, Widyono, 2016, *Korupsi dan Pidana Lainnya, Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Kompas, Jakarta.
- Prasetya, Rudhi, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1966, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, 1983, *Sendi-Sendi Hukum Perdata*, CV Rajawali, Jakarta.
- Putra, Andi Irman, 2008, *Penulisan Kerangka Ilmiah Tentang Perang Prolegnas dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945 (Pasca Amandemen)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Asasi Manusia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1981, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas. Jakarta.
- Rajagukguk, Erman, 2006, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, 2013, *Hukum Keuangan Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., dan Sutorius, Ph. 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Simatupang, Dian Puji Nugraha, 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soemardjono, Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soemitro, Rachmat, 1979, *Penuntutan Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, PT Eresco, Bandung.
- Subagio, M., 1987, *Hukum Keuangan Negara R.I.*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Susanto, Anthon Freddy, 2005, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung.
- Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R dan D*, Alfabeta, Bandung.
- Sulaiman, A., 2011, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Triffterer, Otto, 1999, *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, dalam Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tuankotta, Theodorus M., 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Vlies, I.C. van der, 2005. *Handboek Wetgeving*. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2008, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Wilamarta, Misahardi, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, dalam Ridwan Khairandy, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Affandhi, Frans, dkk, “Business Judgement Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis Yang Diambil”, *USU Law Journal*, Vol. 14, No. 1, 2016.

- Aman, TM, “Cost-Benefit Analysis of the Business Judgement Rule: A Critique in Light of the Financial Meltdown”, *Albany Law Review*, Vol. 74 (1), 2010.
- Boer, Alexander., Engers, Tom van., dan Winkels. Radboud “Mixing Legal and Non-Legal Norms”, *Legal Knowledge and Information Systems: JURIX (the Dutch Foundation for Legal Knowledge Based Systems)* 2005.
- Boot, Machteld, “Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of The International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes”, Intersentia, Antwerpen – Oxford – New York, 2001.
- Branson, Douglas M., “The Rule at Isn’t A Rule Business Judgment Rule”, *Alparaiso University Law Review*, vol. 36, no. 34, 2002, hlm. 632. Dikutip dalam Yafet Yosafet Wilben Rissy, Business Judgment Rule : Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada, dan Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, 2020.
- Busroh, Firman Freaddy, “Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Butarbutar, E. Nurhaini, “Antinomi dalam Penerapan Asas Legalitas dalam Proses Penemuan Hukum”, *Yustisia*, Vol. 1, Vo. 1, Januari-April 201
- Candra, Firman Adi, “Kritisi *Omnibus law* dalam Perspektif Toleran dalam Khilafiyah”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 1, Januari 2021.
- Chandranegara, Ibnu Sina, “Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3, 2019.
- Dicey, A.V., “An Introduction to the Study of the Law of the Constitution”, *Macmillan*, edisi tahun 1971.
- Djamaluddin, Yundini Husni, 2021, “The Concept of the Principles of Legal Certainty, Benefet and Justice in Environmental Management, *International Journal of Research and Inovation in Social Science (IJRISS)*, Vol. V, Issue II, February 2021
- Djafar, Wahyudi, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010.
- D. Simons, “Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht”, *Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V.-Groningen-Batavia*. 1937.

- Fitryantica, Agnes, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi 3, Oktober-November 2019
- Giraldo, Carlos Andres Laguado, 2006, “Factors Governing The Application of Business Judgement Rule: An Empirical Study of The US, UK, Australia and The EU”, *University of Bogota (Colombia)*, No. 111.
- Gold, Andrew S., “A Decision Theory Approach to the Business Judgement Rule: Reflections on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty”, *Maryland Law Review*, Vol. 66, Issue 2, 2007.
- Greenhow. A, “The Statutory Business Judgment Rule : Putting The Wind Into Directors Sails”, *Bond Law Review*, vol. 11, no. 1, 1999.
- Hadi, Shigeko Desiputri, Aam Suryamah, dan Anita Afriana, “Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumn Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4, No. 2., Juni 2021.
- H.B. Vos, “Leerboek an Nederlands Strafrecht”, *Derde Herziene Druk, H.D.Tjeenk Wilink & Zoon N.V.-Haarlem.*, 1950.
- Hiariej, Edward O.S., “Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan”, Dinal Fedrian, et. al. (ed)., *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2012.
- Irfani, Nurfaqih, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2020.
- Johnson, Lyman P.Q., “The Modest Business Judgement Rule”, *The Business Lawyer*, Vol. 55, hlm. 626, 2000.
- Johnson, Lyman P.Q., “Corporate Officers and the Business Judgment Rule”, *Business Law*, Vol. 60, 2005.
- J.H., Farrar, “Corporate Governance Theories, Principles, and Practices”, *Oxford University Press*, 2001.
- Khairandy, Ridwan, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, *Jurnal Hukum No 1*, Vol 16, 2009.
- Lestari, Sartika Nanda, “Business Judgement Rule sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, *Jurnal Notarius*, Vol 8, No. 2, 2015

- Malec, Andrzej, 2001. "Legal Reasoning and Logic", dalam *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, Vol. 4 No.17.
- Manning, Bayless, "The Business Judgement Rule in Overview", *Ohio State Law Journal*, Vol. 45, Issue 3, 1984.
- Marbun, Eldbert Christanto Anaya, "Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)", *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No.3, September 2022.
- Muqadas, Busyro, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, 2002.
- Muryati, Dewi Tuti, B. Rini Heryanti, dan Dharu Triasih, "Kajian Normatif Atas Kepailitan Bumn (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* Vol 17, No. 1, 2015.
- Panjaitan, Robin, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap Direksi yang Melakukan Kebijakan yang Merugikan Perusahaan", *Jurnal Hukum PATIK*, Volume 10, No 1, 2021.
- Parameshwara, "Implementation of Business Judgement Rule Doctrine in Indonesia", *IOSR Journal Of Humanities and Social Science*, Vol. 21, Issue. 8, 2016.
- Pelling, Lysarne, "Fulfilling Parlement's Intention: A Business Judgement Rule to Stimulate Responsible Risk-Taking and Economic Growth, Governance Direction", July, 2015.
- Prayogo, R. Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)", *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016
- Putra, Antoni, "Penerapan *Omnibus law* dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 17, No. 11, Maret 2020
- Toruan, Henry Donald Lbn., "Pembentukan Regulasi Badan Usaha dengan Model *Omnibus Law*", *Jurnal Hukum Tôt-Râ*, Vol. 3 No. 1, April 2017.
- Wantu, Fence M., "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007

Weng, Charlie Xiao-chuan, "Assessing the Applicability of the Business Judgment Rule and the "Defensive" Business Judgment Rule in the Chinese Judiciary: A Perspective on Takeover Dispute Adjudication", *Fordham International Law Journal*, Vol. 34, Issue 1, 2010.

W.P.J Pompe, 1959, "Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht", *Vijfde Herziene Druk*, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. 1959.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi,

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28/PMK.06/2013 Tentang Penyusunan, Penyampaian Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia 2018.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP- 32/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, selanjutnya disingkat Peraturan Nomor IX.E.1

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU-IX/2011 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU-IX/2011 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XI/2013 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 8 September 2016 dan 5 Desember 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21 P/Hum/2017 Atas Pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1781/B/PK/PJK/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006 tertanggal 13 September 2007.

E. Sumber Lainnya

- Adji, Indriyanto Seno, “Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara?”, akalah, Disampaikan pada diskusi Panel dengan topik “Kebijakan Aparatur Negara & Pertanggungjawaban pidana”, pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tema “Revitalisasi Peran Gubernur Guna Menciptakan Sinergitas & harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah”, Kamis 2 Desember 2010, Hotel Grand Preanger, Bandung.
- Akbar, Muhammad Fatahillah, 2023, “Koneksitas dalam Tindak Pidana Korupsi”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/13/koneksitas-dalam-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 11 Januari 2024.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, (Ketua Tim Penyusun), 2010, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (sumber-Sumber Keuangan Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2012, *Pola Pikir Hukum (Legal Mindscapes) Definisi Keuangan Negara yang Membangun Praktek Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Mengakar (Deep Rooted Business Practiced)*, disampaikan dalam Seminar Publik “Perspektif UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Keuangan Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” diselenggarakan oleh Diponegoro Institute, Jakarta, 25 Januari 2012.
- Detik Finance, "SBY Minta Direksi BUMN Tak Takut", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-766376/sby-minta-direksi-bumn-tak-takut>., diakses 28 Maret 2024.
- Djajanto, Achiran Pandu, 2015, *Peranan Hukum Dalam Holdingisasi Dalam Rangka Memperkuat Aset Perusahaan BUMN sebagai Kekayaan Negara yang Dipisahkan* (Ringkasan Disertasi), Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, America, West, Thomson Group, 2010.
- Hardjon, Philips M., “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)”, *Yuridika*, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember, 1994
- Hiariej, Eddy OS, 2009, *Asas Legalitas dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Humas, 2023, *Harmonisasi Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content

&view=article&id=5525:harmonisasi-ketentuan-pidana-di-luar-kuhp&catid=268&Itemid=73&lang=en, diakses pada 20 Januari 2024.

Ismail, Fauzie Kamal, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada 5 Januari 2024.

Kejaksaan Negeri Bone, “Analisa konsep keadilan kepastian dan kemanfaatan dalam penekagakan hukum tindak pidana pertambangan”, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilankepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>. Diakses pada 7 Desember 2021.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi., 2023 “Ban-S/M tegas dengan kepemimpinan kolektif kolegial” https://bansm.kemdikbud.go.id/berita_/read/ban-s-m-tegas-dengan-kepemimpinan-kolektif-kolegial, diakses pada 23 Februari 2024.

Klikrdi, “Ahli Perbankan Sebut Terjadi Konflik Norma Perdata dan Pidana”, <https://klikrdi.blogspot.com/2017/07/ahli-perbankan-sebut-terjadi-konflik.html?m=1>, diakses Pada 27 Januari 2024.

Koalisi Pemantau Peradilan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Usul Inisiatif Masyarakat, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VIII”, 2019.

Natalia, 2023, “PT (Perseroan Terbatas): Pengertian PT, Jenis, Ciri-ciri, dan Unsurnya” <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-pt/>, diakses pada 30 September 2021.

Noor, Hendry Julian, 2018, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis Dan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

N.d, “*Business Judgement Rule* dalam UU Perseroan Terbatas” <https://doktorhukum.com/business-judgement-rule-dalam-uu-perseroan-terbatas/>, diakses pada 10 Maret 2022.

Rajagukguk, Erman, “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara, *Makalah*, Disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi” Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta, 26 Juli 2006.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Sindir Aparat Hukum, Presiden Jokowi: Banyak Investor, Termasuk BUMN Dicari-Cari Kesalahan”, <https://setkab.go.id/sindir-aparat-hukum-presiden-jokowi-banyak-investor-termasuk-bumn-dicari-cari-kesalahan/>
<https://setkab.go.id/sindir-aparat-hukum-presiden-jokowi-banyak-investor-termasuk-bumn-dicari-cari-kesalahan/>, diakses pada 28 Maret 2024.

Sekretariat KADIN Indonesia, “Pebisnis Wajib Tahu! Apa itu Risiko Usaha, Jenis, dan Solusinya”, <https://kadin.id/analisa/pebisnis-wajib-tahu-apa-itu-risiko-usaha-jenis-dan-solusinya/>, diakses pada 7 Desember 2023.

Shidarta dan Lakonawa, Petrus, 2018, “Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>, diakses 8 Januari 2024.

Sidharta, *Asas Una Via dalam Penerapannya*, dalam Bina Nusantara (https://www.researchgate.net/publication/374133344_Asas_Una_Via_dalam_Penerapannya#fullTextFileContent) 2023, diakses 28 Maret 2024.

Simatupang, D.P., 2007, *Anggaran Negara dan Keuangan Publik*, dalam Sri Mamudji, (ed), *Hukum Administrasi Negara*, CLGS FH UI, Jakarta.

Slamet, Budiman dan Widyaiswara, 2013, “Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam Audit Investigatif”, <https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/konten/show/1000>, diakses pada 30 September 2021.

Stelmach, Jerzy dan Brożek, Bartosz. 2006. *Methods of Legal Reasoning*, Dordrecht, Springer.

Stockton, Kilpatrick, 2003, *Director Fiduciary Duties After Sarbanes-Oxley*, LPP, Atlanta.

Sugarda, Paripurna P. “Meninjau Kembali Anggapan Yuridis Kekayaan Perseroan Merupakan Bagian dari Keuangan atau Kekayaan Negara dan Perlakuannya di Masa yang Akan Datang”, disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, 16 November 2023.

Tandra, Soedoso, 2019, *Sita Umum yang di Atasnya terdapat Sita Pidana*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wibisiono, Christianto, 1992, “Profil dan Anatomi BUMN”, Majalah Prisma: *Peran BUMN dalam Ekonomi Kapitalis*, Nomor 2, Tahun XXI.